



# InAng Cestar

Informasi APBN yang Cepat, Transparan, Responsif



Edisi III 2025

# Selayang Pandangan



Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar berhasil menerbitkan Buletin Inang Cetar Edisi III 2025.

Buletin ini disusun sebagai bentuk sarana atau media publikasi informasi, komunikasi, dan edukasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar kepada seluruh mitra KPPN Pematang Siantar dan juga seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun terkait perkembangan kinerja keuangan atas pengelolaan APBN yang dilakukan oleh KPPN Pematang Siantar.

Buletin Inang Cetar Edisi III kali ini memuat *timeline* kegiatan KPPN Pematang Siantar sepanjang triwulan III tahun 2025 serta informasi realisasi APBN periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 yang disalurkan oleh KPPN Pematang Siantar.

Selain itu, edisi kali ini memuat artikel-artikel menarik seputar Tujuan dan Arah Kebijakan APBN Tahun 2026, Mengenal IKPA, Sang Pengawal APBN, Menyala "Koperasi Merah Putih" ku, Tugu Dayok Mirah, dan Keberlanjutan Zona Integritas KPPN Pematang Siantar: Menjaga Predikat WBBM dan Meningkatkan Layanan.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buletin Inang Cetar. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buletin ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Selamat membaca. Kami harapkan buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mendukung keuangan daerah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dan keuangan nasional menuju Indonesia Maju.

# Daftar Isi

Selayang Pandang.....	1
Daftar Isi.....	2
REALISASI BELANJA APBN, PEMERINTAH PUSAT DAN TKD PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025.....	4
MENGENAL IKPA, SANG PENGAWAL APBN.....	8
MENYALA “KOPERASI MERAH PUTIH” KU.....	11
TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN APBN TAHUN 2026.....	16





KEBERLANJUTAN ZONA INTEGRITAS KPPN  
PEMATANG SIANTAR: MENJAGA  
PREDIKAT WBBM DAN MENINGKATKAN  
LAYANAN .....21

TUGU DAYOK MIRAH.....28

GALERI KEGIATAN KPPN PEMATANG  
SIANTAR TRIWULAN III TAHUN 2025 .....29

# REALISASI BELANJA APBN, PEMERINTAH PUSAT DAN TKD PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2025

OLEH: TRISFILA DELVIA

Perkembangan realisasi anggaran hingga Triwulan III atau sampai dengan September di wilayah kerja KPPN Pematang Siantar, yang mencakup Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, menunjukkan tren positif yang signifikan dari tahun ke tahun.



Sampai dengan akhir Triwulan III 2025, pagu anggaran belanja di KPPN Pematang Siantar mencapai Rp4.360.129.421.000,- yang terdiri dari pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.209.678.841.000,- dan pagu anggaran belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp3.150.450.580.000,-. Hingga 30 September 2025, realisasi anggaran belanja telah mencapai Rp3.219.765.495.122,- atau 73,85% dari total pagu anggaran. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, capaian realisasi anggaran belanja pada Triwulan III 2025 tumbuh negatif sebesar -0,74%. Penurunan realisasi anggaran belanja ini disebabkan dengan adanya pertumbuhan negatif pada realisasi anggaran belanja K/L (-7,28%) meski terdapat pertumbuhan positif pada belanja TKD (2,04%). Adapun capaian kinerja realisasi anggaran dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dapat dilihat lebih rinci pada tabel di bawah ini:

## REALISASI BELANJA APBN, PEMERINTAH PUSAT, DAN TKD ...

Jenis Belanja	s.d. September 2024 (y-1)			s.d. September 2025			growth Realisasi (yoy)
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
<b>BELANJA K/L</b>	<b>Rp1.380.037.289.000</b>	<b>Rp967.768.824.051</b>	<b>70,13%</b>	<b>Rp1.209.678.841.000</b>	<b>Rp897.293.978.056</b>	<b>74,18%</b>	<b>▼ -7,28%</b>
51 - Blj. Pegawai	Rp847.885.256.000	Rp655.982.158.031	77,37%	Rp950.899.695.000	Rp730.844.877.151	76,86%	▲ 11,41%
52 - Blj. Barang	Rp475.378.646.000	Rp304.158.802.004	63,98%	Rp244.031.113.000	Rp158.406.740.271	64,91%	▼ -47,92%
53 - Blj. Modal	Rp56.773.387.000	Rp7.627.864.016	13,44%	Rp14.748.033.000	Rp8.042.360.634	54,53%	▲ 5,43%
<b>BELANJA TKD</b>	<b>Rp3.250.241.303.000</b>	<b>Rp2.276.148.464.168</b>	<b>70,03%</b>	<b>Rp3.150.450.580.000</b>	<b>Rp2.322.471.517.066</b>	<b>73,72%</b>	<b>▲ 2,04%</b>
61 - DBH	Rp97.318.047.000	Rp36.669.898.918	37,68%	Rp115.030.276.000	Rp58.453.630.000	50,82%	▲ 59,40%
62 - DAU	Rp2.087.895.254.000	Rp1.533.180.669.110	73,43%	Rp2.097.851.585.000	Rp1.690.648.998.709	80,59%	▲ 10,27%
63 - DAK Fisik	Rp235.036.598.000	Rp119.897.440.060	51,01%	Rp90.125.467.000	Rp22.873.072.318	25,38%	▼ -80,92%
64 - DID	Rp6.737.985.000	Rp3.368.992.500	50,00%	Rp7.327.354.000	Rp0	0,00%	▼ -100,00%
65 - DAK NonFisik	Rp479.584.565.000	Rp336.289.211.380	70,12%	Rp507.355.380.000	Rp320.856.277.743	63,24%	▼ -4,59%
66 - Dana Desa	Rp343.668.854.000	Rp246.742.252.200	71,80%	Rp332.760.518.000	Rp229.639.538.296	69,01%	▲ -6,93%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp4.630.278.592.000</b>	<b>Rp3.243.917.288.219</b>	<b>70,06%</b>	<b>Rp4.360.129.421.000</b>	<b>Rp3.219.765.495.122</b>	<b>73,85%</b>	<b>▼ -0,74%</b>

### A. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja K/L

Sampai dengan September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) telah mencapai Rp897,29 triliun atau 74,18% dari pagu sebesar Rp1.209,68 triliun. Hal ini menunjukkan adanya dampak dari efisiensi apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat realisasi sebesar 70,13%. Meskipun secara nominal terjadi penurunan pagu dan realisasi belanja K/L secara keseluruhan (yoy -7,28%), komponen belanja pegawai mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,41% dengan realisasi belanja pegawai mencapai 76,86% dari pagu anggaran belanja pegawai. Sebaliknya, belanja barang mengalami kontraksi signifikan sebesar -47,92%, seiring dengan penurunan pagu dan realisasi yang cukup tajam. Sementara itu, belanja modal menunjukkan perbaikan kinerja dengan pertumbuhan realisasi sebesar 5,43% dan peningkatan persentase penyerapan dari 13,44% menjadi 54,53% meski terdapat penurunan pagu anggaran belanja modal.

Salah satu faktor penyebab penurunan pagu dan realisasi anggaran belanja pemerintah adalah kebijakan penghematan anggaran atau kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk mengatasi tekanan fiskal yang meningkat. Pemerintah berupaya mengurangi anggaran belanja yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengeluaran lainnya yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan.

REALISASI BELANJA APBN, PEMERINTAH PUSAT, DAN TKD ...

Sementara itu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan anggaran digunakan secara efisien, dana yang dihemat dari belanja kurang produktif dialihkan ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

**Adapun kinerja total realisasi anggaran belanja K/L dapat dilihat lebih rinci pada grafik berikut:**



**B. Kinerja Realisasi Anggaran Belanja TKD**

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp2.322,47 triliun atau 73,72% dari total pagu sebesar Rp3.150,45 triliun, meningkat 2,04% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja penyaluran tertinggi dicapai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi sebesar Rp1.690,65 triliun (80,59%), tumbuh 10,27% secara yoy. Dana Bagi Hasil (DBH) juga mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 59,40% dengan peningkatan persentase penyerapan dari 37,68% menjadi 50,82%. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami kontraksi tajam sebesar 80,92%, seiring dengan penurunan pagu dan realisasi yang signifikan.

REALISASI BELANJA APBN, PEMERINTAH PUSAT, DAN TKD ...

Dana Insentif Daerah (DID) tidak terealisasi sama sekali hingga akhir September 2025. Sementara itu, Dana Desa dan DAK Nonfisik mengalami penurunan moderat dalam realisasi masing-masing sebesar 6,93% dan 4,59%. Adapun kinerja total realisasi anggaran belanja TKD dapat dilihat lebih rinci pada grafik berikut:



# MENGENAL IKPA, SANG PENGAWAL APBN

OLEH : ULI NATASYA GIRSANG, JF PTPN TERAMPIL KPPN PEMATANG SIANTAR

APBN mengemban tiga fungsi pokok: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mendorong pendanaan program produktif seperti infrastruktur dan pendidikan, fungsi distribusi berfokus pada pemerataan melalui subsidi dan bantuan sosial, sedangkan fungsi stabilisasi menjaga keseimbangan ekonomi nasional lewat kebijakan seperti stimulus dan bantuan tunai. Dengan fungsi yang sangat strategis, muncul tantangan untuk menjaga kualitas pelaksanaan APBN, yakni harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. Melihat betapa pentingnya APBN, dibutuhkan sebuah alat untuk memastikan bahwa APBN telah dilaksanakan dengan optimal dan akuntabel.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang sering disebut IKPA adalah alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai seberapa baik kualitas pelaksanaan anggaran belanja negara oleh setiap satuan kerja (satker). Dalam hal ini, IKPA digunakan untuk memastikan bahwa anggaran tidak hanya terserap, anggaran juga digunakan dengan efektif, efisien, tepat waktu, dan akuntabel. Dengan demikian, IKPA hadir sebagai penjaga mutu APBN agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

IKPA hadir sebagai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa Kementerian/ Lembaga wajib untuk memonitor dan mengevaluasi anggarannya. Berdasarkan peraturan tersebut, disusunlah peraturan yang mengatur terkait teknis perhitungan IKPA yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L.

IKPA memiliki tiga aspek utama, yakni Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pertanggungjawaban Anggaran. Dari tiga aspek tersebut, dikembangkan tujuh komponen perhitungan IKPA. Pada Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, terdapat dua komponen penilaian yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Revisi DIPA merupakan indikator yang mengukur seberapa sering satuan kerja melakukan perubahan/revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah ditetapkan. Indikator ini tentunya menghitung seberapa matang kualitas perencanaan awal anggaran. Di sisi lain, Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran secara periodik, untuk menilai akurasi perencanaan penyerapan anggaran satuan kerja setiap bulan maupun triwulan.

Pada Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa komponen, diantaranya Indikator Penyerapan Anggaran yang mengukur ketepatan waktu dan pemerataan realisasi sepanjang tahun anggaran, Indikator Belanja Kontraktual yang mengukur ketepatan waktu dalam menyampaikan dan merealisasikan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, Indikator Penyelesaian Tagihan yang mengukur kecepatan dan ketepatan pengajuan tagihan belanja ke KPPN, serta Indikator Pengelolaan UP dan TUP untuk mengukur kepatuhan dan ketepatan waktu pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Terakhir, pada Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, terdapat satu indikator, yaitu Indikator Capaian Output. Indikator Capaian Output digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kinerja (output) dari program/kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam DIPA. Tujuan dari Indikator ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan output nyata sesuai sasaran, bukan sekadar terserap. Dari indikator ini, dinilai bagaimana anggaran digunakan secara efektif, bagaimana belanja negara mewujudkan manfaat yang direncanakan.

Ketiga aspek penilaian pada IKPA yang dituangkan dalam tujuh komponen tersebut, dinilai secara periodik, baik bulanan, triwulanan maupun tahunan dalam bentuk skor dan nilai, dan menjadi dasar bagi satuan kerja dan Kementerian/ Lembaga untuk mengevaluasi kinerja anggaran pada tahun anggaran berjalan serta memperbaiki tata kelola anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Dari sisi implementasi, IKPA sendiri masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola anggaran sering kali membuat proses pelaksanaan tidak optimal. Tantangan lain adalah munculnya kecenderungan sebagian satuan kerja hanya berfokus mengejar nilai IKPA, tanpa benar-benar menjadikan instrumen ini sebagai sarana peningkatan kualitas belanja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM, sehingga para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan negara memiliki kompetensi yang memadai. Digitalisasi tata kelola anggaran juga penting untuk memperkuat akurasi data dan efektivitas monitoring. Lebih dari itu, IKPA harus diposisikan sebagai alat pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan, bukan sekadar instrumen pengendali atau formalitas penilaian. Dengan demikian, IKPA benar-benar berfungsi sebagai penjaga mutu APBN, sehingga kualitas belanja negara meningkat, pembangunan lebih tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.



# MENYALA “KOPERASI MERAH PUTIH” KU

*OLEH TOMMY HANSEN PANJAITAN, KEPALA SEKSI BANK*



Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, koperasi merupakan bentuk nyata atas pelaksanaan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, koperasi sudah mulai tumbuh dan berperan dalam memperkuat ekonomi rakyat. Dalam menjalankan amanat UUD 1945 tersebut Bapak Presiden Prabowo telah mencanangkan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Nusantara. Pembentukan koperasi tersebut bertujuan untuk mendorong ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu sejak bulan Juli 2025 lalu telah dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di seluruh Indonesia.

Pengembangan ekonomi desa yang dapat diwujudkan KDMP/KKMP melalui pendirian berbagai jenis usaha yang sesuai kebutuhan masyarakat. Gerai usaha yang bisa dikembangkan antara lain Gerai Sembako yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Berikutnya, Gerai Apotik Desa di mana KDMP/KKMP menyediakan dan menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Adanya Gerai *Cold Storage* untuk menyimpan hasil pertanian dan perikanan serta produk segar lainnya agar tetap berkualitas. Gerai lain yang diperlukan yaitu Gerai Klinik Desa untuk melayani kesehatan dasar yang langsung dapat diakses masyarakat. Serta adanya dukungan logistik untuk mendukung distribusi pengiriman barang baik antar desa maupun antar daerah hingga antar regional. Disamping itu terdapat kantor yang dapat melayani administrasi dan layanan anggota.

Sebanyak 466 KDMP/KKMP telah berdiri pada 53 kelurahan di Kota Pematangsiantar dan 386 desa serta 27 kelurahan di Kabupaten Simalungun sebagai wilayah kerja KPPN Pematang Siantar. Pendirian KDMP/KKMP sesuai ketentuan berdasarkan Akte Notaris.

## Peluang

Pembentukan KDMP/KKMP diharapkan dapat mendukung penguatan ekonomi rakyat yang berbasis gotong-royong dan menciptakan kemandirian lokal dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa dan kelurahan. Contoh pada Kabupaten Simalungun mempunyai potensi pariwisata sebagai daerah yang berada di sekitar Danau Toba sebagai salah satu PSN di Sumatera Utara. KDMP/KKMP diharapkan dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa/kelurahan. Disamping sektor pariwisata terdapat juga sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Simalungun yang masih bisa digarap oleh KDMP/KKMP.

Kota Pematangsiantar merupakan kota perdagangan, pendidikan dan pusat distribusi/logistik untuk daerah sekitarnya. Sektor pendidikan misalnya, Kota Pematangsiantar mempunyai banyak perguruan tinggi yang *representative* dan kualitas pendidikan yang baik. Sehingga ketersediaan sumber daya manusia sangat mumpuni dalam mengelola dan mendorong pengembangan KKMP.

Sektor-sektor yang dimiliki oleh Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun menjadi motor penggerak perekonomian di daerah serta sumber pokok penghidupan masyarakat. Sektor-sektor tersebut tidak hanya bernilai ekonomi tetapi mencerminkan pula pola perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang berbasis pada semangat gotong-royong, kebersamaan disamping adanya kearifan lokal. Disinilah peran KDMP/KKMP untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.

## **Tantangan dan Hambatan**

Melihat peluang besar di atas terdapat pula tantangan dan hambatan yang harus dihadapi KDMP/KKMP dalam implementasinya. Beberapa tantangan dan hambatan itu antara lain :

### **1. Permodalan**

KDMP/KKMP yang baru dibentuk di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun belum mempunyai modal usaha yang kuat. Fokus utama yang baru dilaksanakan adalah pembentukan gerai usaha berdasarkan identifikasi jenis usaha sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan. Pada prinsipnya kekuatan KDMP/KKMP seperti yang dijelaskan di atas yaitu bersandar pada semangat gotong-royong dan kebersamaan. Disamping pengurus, peran aktif masyarakat sebagai anggota KDMP/KKMP sangat diperlukan dalam menjalankan operasional KDMP/KKMP. Di Kota Pematangsiantar, KKMP Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur yang sudah berjalan secara operasional .

### **2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Secara umum menyangkut kesiapan SDM, dalam hal ini anggota masyarakat yang hendak menjadi pengurus perlu dilakukan peningkatan kompetensi.

### 3. Keterbatasan Ruang Fiskal Daerah

Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun mempunyai tingkat kemandirian fiskal rendah. APBD kedua daerah tersebut sangat bergantung pada dana Transfer ke Daerah. Hal tersebut memperlihatkan pendapatan daerah masih bergantung dari transfer pusat. Padahal dengan kondisi sekarang diperlukan support pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan penyuluhan tentang KDMP/KKMP, pelatihan peningkatan kompetensi pengelolaan koperasi dan pendampingan terhadap pengurus.

### **Kesimpulan**

Dari deskripsi di atas, KDMP/KKMP pada Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun sebagian besar masih dalam tahap pembentukan gerai usaha. Sektor-sektor unggulan yang dimiliki kedua daerah sangat mendukung pembentukan bidang usaha yang akan dijalankan. Kedepannya perlu di dukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kompetensi pengurus KDMP/KKMP serta dukungan pembiayaan dari perbankan untuk permodalan KDMP/KKMP sehingga dapat membuat “menyala” Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

# TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN APBN TAHUN 2026

***OLEH SURYA HADI PURNAMA,  
KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI***



Pada tanggal 23 September 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi undang-undang. Dengan disahkannya RUU APBN menjadi UU APBN Tahun 2026 maka rangkaian proses pembahasan dan penetapan APBN yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), penetapan pagu indikatif, penyampaian nota keuangan dan RAPBN, hingga pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR telah rampung dilaksanakan. Tahapan berikutnya dari siklus APBN ialah pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang akan dimulai pada tahun fiskal 2026 mulai 1 Januari 2026.

Sebagaimana APBN tahun sebelumnya, postur APBN Tahun 2026 dirancang ekspansif dengan Defisit APBN ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari pendapatan domestik bruto (PDB). Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp3.842,7 triliun yang terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1.510,6 triliun, belanja Non-kementerian sebesar Rp1.639,2 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp692,9 triliun. Dengan alokasi APBN sebesar itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% dengan inflasi terkendali di level 2,5% dan rasio gini di kisaran 0,377-0,380. Target makroekonomi dalam APBN tersebut diupayakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat ekonomi, dan stabilitas ekonomi yang dinamis.

APBN Tahun 2026 merupakan APBN pertama yang disusun oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung visi dan misi presiden sebagaimana dituangkan dalam Asta Cita. Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pemantapan sistem pertahanan keamanan serta mendorong kemandirian melalui swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pembangunan SDM unggul, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi kehidupan sosial dan lingkungan. APBN Tahun 2026 sebagai pengejawantahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, difokuskan pada 8 (delapan) agenda prioritas. Kedelapan agenda prioritas itu mencakup (1) Ketahanan Pangan, (2) Ketahanan Energi, (3) Makan Bergizi Gratis (MBG), (4) Pendidikan Bermutu, (5) Kesehatan Berkualitas, (6) Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM, (7) Pertahanan Semesta, dan (8) Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.

Untuk mewujudkan 8 agenda prioritas tersebut, anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp164,7 triliun yang digunakan untuk mewujudkan swasembada pangan, stabilisasi harga pangan, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Anggaran ketahanan energi dialokasikan sebesar Rp402,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat. Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan sebesar Rp335 triliun untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta ibu hamil dan balita, sekaligus memberdayakan UMKM serta mendorong ekonomi lokal.

Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp769,1 triliun untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing, melalui berbagai program antara lain: gaji dan tunjangan guru/dosen/tenaga pendidik, pemberian beasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Bantuan Operasional Sekolah, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi. Anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp244,0 triliun untuk mewujudkan kesehatan berkualitas, melalui penguatan efektivitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan revitalisasi Rumah Sakit.

Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp508,2 triliun diarahkan agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sinergis dengan berbagai program lainnya sehingga efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga menekankan penguatan desa dengan membangkitkan koperasi dan memberdayakan UMKM. Pemerintah telah membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mempermudah masyarakat desa mengakses kebutuhan pokok, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan.

Di bidang pertahanan, APBN diarahkan untuk modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dan memperkuat komponen cadangan, termasuk memberdayakan industri strategis nasional serta peningkatan kesejahteraan para prajurit. Di sisi investasi, pemerintah akan menggenjot peran Danantara untuk mengakselerasi investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Fokus investasi antara lain ditujukan pada sektor hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah tinggi, energi terbarukan, infrastruktur digital, industri strategis, serta sektor ketahanan pangan.

Kebijakan belanja negara dalam APBN Tahun 2026 antara lain kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; menyalurkan belanja K/L dengan tema RKP dan kebijakan fiskal 2026; menjaga kebutuhan belanja minimum pemerintahan; mengoptimalkan belanja sebagai stimulus perekonomian; harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Belanja K/L dengan TKD; dan mengutamakan penggunaan komponen/produk dalam negeri. Sedangkan kebijakan penerimaan negara di bidang perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; pengawasan berbasis teknologi informasi, sinergi dan join program, serta penegakan hukum; keberlanjutan reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional; dan Insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur. Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; peningkatan inovasi, evaluasi kebijakan, serta pengawasan PNBP guna meningkatkan kepatuhan, serta optimalisasi PNBP, termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan penguatan sinergi antar instansi termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menerangkan APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi agar berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, menggerakkan sektor riil serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. APBN Tahun 2026 telah ditetapkan dengan perencanaan yang matang dan sasaran yang jelas. Tugas kita berikutnya sebagai insan pengelola keuangan negara ialah memastikan pelaksanaan APBN berjalan dengan baik sesuai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta mempertanggungjawabkannya secara akurat dan akuntabel.

## KEBERLANJUTAN ZONA INTEGRITAS KPPN PEMATANG SIANTAR: MENJAGA PREDIKAT WBBM DAN MENINGKATKAN LAYANAN *Oleh Yusuf Prihantoro, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal*



Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan strategi fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi. Dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), ZI bertujuan menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai instansi yang berkomitmen pada Reformasi Birokrasi, KPPN Pematang Siantar terus menggiatkan pembangunan zona integritas. KPPN Pematang Siantar bertekad menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh stakeholders.

KPPN Pematang Siantar telah berhasil meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari Kementerian PAN-RB pada tahun 2024. Meskipun telah mencapai level tertinggi, KPPN Pematang Siantar memastikan pembangunan ZI terus berkelanjutan melalui berbagai kegiatan inovatif.

## Program Keberlanjutan ZI Triwulan III Tahun 2025

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Zona Integritas dan peningkatan kualitas layanan, KPPN Pematang Siantar rutin melaksanakan program-program di setiap triwulan. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2025 antara lain:

### A. Penguatan Integritas dan Internal

1. **Sortali (*Sharing our reaction and talking about integrity*)**: Inovasi ini berupa kegiatan sharing mengenai integritas, mulai dari pembahasan tokoh nasional/internasional, film bertema integritas, hingga materi internal. Pada Triwulan III 2025, Sortali fokus membahas:

- Pengawasan melekat dan budaya sadar risiko.
- Pengendalian intern pada Lini I.
- Indeks integritas unit.

2. **Capacity Building**: Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi antar pegawai serta antar-seksi/subbagian di KPPN Pematang Siantar. Hal ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas kerja yang dihasilkan oleh setiap bagian.

3. **Pembinaan Mental Pegawai**: Pembinaan mental dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dengan tujuan utama menjaga dan meningkatkan kesehatan mental para pegawai.

4. **Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Pembangunan ZI**: Kegiatan rutin bulanan ini memastikan bahwa pembangunan ZI terus berlanjut pasca-predikat WBBM. Evaluasi ini menjamin seluruh kegiatan terlaksana sebagai upaya peningkatan layanan serta menjaga nilai integritas, antikorupsi, dan antigratifikasi.

## **B. Peningkatan Layanan dan Komunikasi Eksternal**

1. ***Island of Integrity***: Merupakan kegiatan penyebarluasan pembangunan zona integritas kepada stakeholders. Pada triwulan ini, KPPN Pematang Siantar berkesempatan menyampaikan materi pembangunan ZI kepada Kejaksaan Negeri Simalungun.

2. ***Press Release APBN (Kolaborasi Kemenkeu Satu)***: Diselenggarakan setiap bulan berkolaborasi dengan instansi Kementerian Keuangan Satu di Kota Pematangsiantar (KPP Pratama, KPPBC, KPKNL dan KPPN Pematang Siantar). Kegiatan ini menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan pendapatan dan belanja di wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, sekaligus menjadi ajang untuk mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi nilai integritas dan semangat antikorupsi.

3. ***Service Excellence***: Kegiatan peningkatan kualitas layanan ini diselenggarakan untuk memastikan layanan terbaik kepada stakeholders. KPPN Pematang Siantar bekerja sama dengan pihak perbankan dalam menyelenggarakan pelatihan service excellence bagi seluruh pegawainya.

Foto-foto kegiatan:



KPPN Pematang Siantar

djpb.kemenkeu.go.id



KPPN Pematang Siantar

djpb.kemenkeu.go.id



KPPN Pematang Siantar

djpb.kemenkeu.go.id



KPPN Pematang Siantar

djpb.kemenkeu.go.id

## Foto-foto kegiatan:



### Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025, Serta Pemberian Penghargaan Kepada Satuan Kerja dan Pengelola Keuangan Terbaik

Selasa, 26 Agustus 2025



 KPPN Pematang Siantar [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)





 KPPN Pematang Siantar [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)



### Service Excellence

Bank BSI Pematangsiantar

Kamis, 28 Agustus 2025



 KPPN Pematang Siantar [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)



### Capacity Building



 KPPN Pematang Siantar [djp.kemenkeu.go.id](http://djp.kemenkeu.go.id)

## Foto-foto kegiatan:



Foto-foto kegiatan:



BINTAL KRISTEN

KPPN Pematang Siantar

djpb.kemenkeu.go.id



Marsitandaan

Pengembangan Relasi dengan Pegawai KPPN

KPPN Pematang Siantar

djpb.kemenkeu.go.id

# Tugu Dayok Mirah

## Oleh Nova Juliana Sianturi



Hai, Sobat CETAR. Memasuki Kota Pematangsiantar, lebih tepatnya di perempatan Rambung Merah, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, kita akan disambut oleh Tugu Dayok Mirah. Pasti teman-teman akan berpikir; apakah Kota Pematangsiantar merupakan kota penghasil ayam jantan terbesar di Sumatera Utara sehingga punya tugu ayam jantan merah? Yang pasti, ada cerita dalam pendirian Tugu Dayok Mirah.

Tugu Dayok Mirah tersebut merupakan simbol budaya Simalungun yang digambarkan sebagai ayam jantan merah. Tugu Dayok Mirah berdiri menghadap ke arah Timur, dengan cat berwarna hitam dan merah. Sebagai pijakan Dayok Mirah, digunakan bangunan beton bulat melingkar dan terdapat tulisan aksara Simalungun dan ornamen-ornamen warna merah, putih, dan hitam sebagai ciri khas etnis Batak Simalungun.

Tugu Dayok Mirah memiliki filosofi yang sangat dalam bagi masyarakat Batak Simalungun. Dayok Mirah berasal dari Bahasa Simalungun yang artinya ayam jantan merah, memiliki makna membangunkan masyarakat untuk memulai aktivitas pada pagi hari. Bagi masyarakat Simalungun, Dayok Mirah merupakan simbol wibawa, kekuatan, dan kekuasaan.

Dayok Mirah memiliki histori dan legenda dalam masa Kerajaan Siattar. Raja Pertama Kerajaan Siattar yaitu Raja Partiga-tiga Sipunjung, disebut dengan Raja Namartuah Damanik, memiliki ayam jantan berwarna merah (dayok mirah) yang terus dibawa dalam keseharian, disebut Dayok (manuk) Sihulabu. Konon, menurut legenda, Raja Namartuah Damanik melakukan pertarungan memperebutkan daerah kekuasaan dengan laga ayam melawan penguasa dari Kerajaan Batangio bermarga Sinaga. Ayam Sihulabu milik Raja Namartuah Damanik menang dan menewaskan ayam milik Raja Batangio yang merupakan penguasa di Pulau Holang yaitu Pematang yang sekarang. Setelah Manuk Sihulabu menang, sesuai perjanjian, wilayah itu diberikan kepada Raja Partiga-tiga Sipunjung, wilayah itulah yang kemudian menjadi pusat Kerajaan Siantar.

Itulah sedikit cerita tentang Tugu Dayok Mirah yang menjadi salah satu ikon/symbol di Kota Pematangsiantar dan juga sebagai bagian dari simbol etnis Simalungun. Sudahkah Anda melihat Tugu Dayok Mirah? Ayo ke Siantar!!!

# Galeri Kegiatan Bulan Juli

3 Juli



Dison Tabo "Positif Reframing"

3 Juli

Perpisahan Pegawai



4 Juli

Family Day



# Galeri Kegiatan Bulan Juli

**8 Juli**

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perbendaharaan Negara Periode Juli 2025 dengan topik Deviasi Halaman III DIPA.



**10 Juli**

DISON TABO "Kenapa kita bisa bosan? Dan bagaimana cara mengatasinya?"



**11 Juli**

Olahraga Bersama-Jalan Santai



# Galeri Kegiatan Bulan Juli

**16 Juli**

Rapat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBN)



**17 Juli**

Perpisahan Pegawai



**17 Juli**

Dison Tabo "Filsafat Sebuah Batu"



# Galeri Kegiatan Bulan Juli

**24 Juli**



Dison Tabo “Kata Istilah Oleh Generasi Z”

**25 Juli**

Olahraga Bersama – Jalan Santai



**31 Juli**

Dison Tabo “Manfaat Bunga Matahari”



# Galeri Kegiatan Bulan Agustus



**5 Agustus**

**Audiensi bersama Walikota  
Pematangsiantar**

**7 Agustus**

**Audiensi dengan Bupati Simalungun**



**7 Agustus**

**Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi  
(DKRO)**



# Galeri Kegiatan Bulan Agustus



**8 Agustus**

Olahraga Bersama Satuan Kerja  
Kementerian Keuangan Lingkup  
Pematangsiantar

**14 Agustus**

Dison Tabo "Cara Mengelola  
Keuangan Dengan Lebih Bijak"



**14 Agustus**

Kunjungan Kanwil DJP Sumut II



# Galeri Kegiatan Bulan Agustus



**15 Agustus**

Olahraga Bersama - Voli

**15 Agustus**

Perlombaan HUT RI Ke-80



**17 Agustus**

Upacara Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80



# Galeri Kegiatan Bulan Agustus



**20 Agustus**

Sharing Session "Sinergi Antar Generasi: Membangun Komunikasi Efektif Lintas Generasi"

**20 Agustus**

Best Employee & PNPW II



**21 Agustus**

SORTALI



# Galeri Kegiatan Bulan Agustus



**21 Agustus**

Olahraga Bersama - Jalan Santai

**26 Agustus**

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025



**26 Agustus**

Sharing Session Data Analytics seputar pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2025



# Galeri Kegiatan Bulan Agustus



**27 Agustus**

**Rapat WBBM**

**28 Agustus**

**Dison Tabo "Interaksi, Selesai"**



**28 Agustus**

**Service Excellence & Refreshment  
Cash Management System (CMS)  
Bank BSI Pematangsiantar**



# Galeri Kegiatan Bulan Agustus



**29 Agustus**

**Olahraga Bersama - Senam**

# Galeri Kegiatan Bulan September



**3 September**

Olahraga Bersama - Senam

**3 September**

Capacity Building



**4 September**

Dison Tabo "Techno Feudalism"



# Galeri Kegiatan Bulan September



**11 September**

Treasury Goes To School

**12 September**

Olahraga Bersama - Senam



**16 September**

Audiensi bersama para pelaksana  
Program Makan Bergizi Gratis



# Galeri Kegiatan Bulan September



**16 September**

PAKU Korem 022 Pantai Timur melakukan kunjungan ke KPPN Pematang Siantar

**17 September**

Monev ke Kejari Simalungun



**18 September**

Dison Tabo "Makanan Khas Pematangsiantar"



# Galeri Kegiatan Bulan September



**18 September**

Kunjungan BRI Pematangsiantar

**19 September**

Olahraga Bersama - Jalan Santai



**25 September**

Dison Tabo "Makanan Unik di Berbagai Negara"



# Galeri Kegiatan Bulan September



**25 September**

Forum Konsultasi Publik

**25 September**

Kunjungan Kepala Kanwil DJPb  
Provinsi Sumatera Utara



**26 September**

Olahraga Bersama - Badminton

# Galeri Kegiatan Bulan September



**26 September**

**Bintal Kristen**

**26 September**

**Bintal Islam**



**30 September**

**Marsitandaan - Pengembangan Relasi dengan Pegawai KPPN**





**KPPN PEMATANG SIANTAR**  
**Jl. Rajamin Purba No.119, Kota**  
**Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara**